

Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan kualitas kehidupan masyarakatnya melalui perbaikan perekonomian di berbagai sektor. Dalam memperbaiki perekonomian masyarakat harus disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah sehingga konsistensi dan kontinuitas pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan sektoral perlu adanya langkah-langkah taktis dan nyata berupa rencana strategis pembangunan sektoral yang secara teknis memiliki spesifikasi khusus dalam menjalankannya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka disusun langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah subsektor perkebunan kurun waktu lima tahun ke depan (2013-2018) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Dalam perumusan perencanaannya, rencana strategi beserta turunannya harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Perkebunan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat dua jenis program dalam pelaksanaan pembangunan yakni program strategis yang merupakan bentuk program atau kegiatan yang merujuk langsung pada sasaran renstra dan program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan renstra Dinas Perkebunan. Meskipun begitu, keseluruhan program dan kegiatan dalam pengembangan subsektor perkebunan harus diturunkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan suatu operasionalisasi dari strategi atau kebijakan pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan dengan cakupan teknis lebih mendalam dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, setiap program harus dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar selalu berada dalam satu koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara global, dalam hal ini sasaran Renstra Dinas Perkebunan.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat diatasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Setiap program dalam merealisasikan strategi pembangunan memiliki fungsi dan karakter yang berbeda. Meskipun begitu, integral dari program tersebut akan memiliki muara yang sama yakni terwujudnya visi Dinas Perkebunan sebagai lembaga yang dipercaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan subsektor perkebunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka dirumuskan program-program prioritas sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Pertama

Sasaran Meningkatkan produksi, produktivitas, dan terbangunnya kebun kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, & lada			
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 1: Peningkatan produksi perkebunan			
1	Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan	Program peningkatan produktivitas perkebunan	Jumlah produksi (ton/tahun)
		✓ Intensifikasi komoditi perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman (ton/ha/tahun)
		✓ Rehabilitasi komoditi perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman (ton/ha/tahun)
		✓ Peremajaan komoditi perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman (ton/ha/tahun)
2	Meningkatkan luas areal perkebunan	Program perluasan kebun sawit	Luas kebun sawit (ha/tahun)

		✓ Ekstensifikasi perkebunan sawit	Penanaman luas kebun (ha/tahun)
		Program perluasan komoditas perkebunan non sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (ha/tahun)
		✓ Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan	Penanaman luas kebun (ha/tahun)
		Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah benih komoditas perkebunan
		✓ Perbanyak bahan tanaman perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan
		✓ Pengelolaan kebun induk/koleksi dan blok penghasil tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara
		Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal
		✓ Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal
		✓ Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi
		Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi
		✓ Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di lab. (karet, aren, lada, kakao, kelapa)
		✓ Sertifikasi benih	Jumlah benih tersertifikasi dan berlabel
		Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan
		✓ Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
		✓ Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
3	Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan	Program penanganan konflik, dan gangguan usaha perkebunan	Jumlah konflik/kasus, jumlah luasan dan jumlah titik api/hot spot
		✓ Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani
		Program pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi
		✓ Pengembangan database usaha perkebunan	Jumlah database dan data spasial
		✓ Pelayanan administrasi perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP
		✓ Pengawasan dan evaluasi usaha perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi
		Program pengendalian kebakaran kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan

		✓ Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun
--	--	-----------------------------------------------------------	----------------------

Tabel 5.2.
Program dan Kegiatan Strategi Kedua

Sasaran	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional		
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 2: Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk			
1	Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil	Program peningkatan mutu hasil perkebunan	Persentase produk yang bersertifikasi
		✓ Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina
		✓ Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi
	Penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar	Program peningkatan teknologi terapan perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan
		✓ Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan
		✓ Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan

Tabel 5.3.
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Ketiga

Sasaran	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan		
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 3: Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan			
1	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan	Program peningkatan nilai tambah produk perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan
		✓ Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (karet, kelapa, kakao dan lada)
		✓ Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi
		Program peningkatan teknologi terapan perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan
		✓ Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan

Tabel 5.4.
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Keempat

Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun		
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 4: Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi			
1	Peningkatan kemandirian kelompok tani/gapoktan	Program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani	Jumlah gabungan kelompok tani
		✓ Pembinaan kelompok tani perkebunan	Jumlah kelompok tani
2	Pengembangan asosiasi petani pekebun	✓ Pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun	Jumlah asosiasi
3	Peningkatan kemitraan kelompok tani	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra
		✓ Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usah perkebunan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang
		✓ Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi
		✓ Pengolahan informasi pasar	Jumlah data informasi produk dan pasar

Tabel 5.5.
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kelima

Sasaran	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional teknis perkebunan		
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur fungsional teknis perkebunan			
1	Rekrutmen dan pelatihan	Program pemberdayaan tenaga pendamping perkebunan rakyat	Jumlah SDM petani dan petugas lapang dan teknis perkebunan
		✓ Pelatihan petugas lapang (Fasda) dan teknis perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang

Tabel 5.6.
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Keenam

Sasaran	Menurunnya emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan		
No	Kebijakan	Program/kegiatan	Indikator
Strategi 6: Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan			
1	Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan	Program mitigasi emisi gas rumah kaca	Psentase emisi yang diturunkan BAU
		✓ Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi
		✓ Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan
		Program pengembangan bio pestisida dan agens pengendali hayati (APH)	Jumlah bio pestisida dan agens pengendali hayati (APH)
		✓ Pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak
		✓ Uji terap aplikasi agens pengendali hayati, bio pestisida dan pestisida kimia	Jumlah uji APH, bio pestisida dan pestisida kimia
		Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi
		✓ Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV
		✓ Perlindungan sumber air diareal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (embung, biopori dan drainase)
		Program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu
		✓ Pelatihan SL-PHT Lapang	Jumlah orang terlatih
		Program pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT
		✓ Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT
		✓ Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan

Penjabaran dari program-program Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Secara umum, subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari segi produksi komoditas perkebunan, kuantitas hasil panen meningkat dari tahun ke tahun terutama pada komoditas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yakni kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada. Selain peningkatan produksi, produktivitas komoditas tertentu seperti kelapa sawit, karet, dan kakao mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada periode sebelumnya. Perkembangan produktivitas hasil panen subsektor perkebunan disebabkan karena program pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Perkebunan) dalam mengelola dan manajemen sumber daya perkebunan tepat sasaran terutama dalam hal penambahan luas tanam, kuantitas komoditas, dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

Untuk lebih mengembangkan kembali subsektor perkebunan dan melanjutkan tren peningkatan produktivitas, maka pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi komoditi perkebunan;
- b. Rehabilitasi komoditi perkebunan;
- c. Peremajaan komoditi perkebunan;

2. Program Perluasan Kebun Sawit

Perluasan kebun sawit merupakan usaha penambahan baku luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi perkebunan komoditas kelapa sawit. Sasaran utama perluasan areal perkebunan kelapa sawit adalah pengembangan perkebunan rakyat. Program ini dilaksanakan karena komoditas kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Provinsi Kalimantan Timur, selain karena lahan yang cocok bagi komoditas kelapa sawit, juga karena produktivitas kelapa sawit yang cukup lama dan konsisten sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2009-2013 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,55 persen

per tahun yaitu dari 530.554 ha pada tahun 2009 menjadi 1.002.294 ha pada tahun 2013. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan pengembangan komoditas kelapa sawit pada periode sebelumnya, maka pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan berupa "*Ekstensifikasi perkebunan sawit*".

Program ini akan didukung dengan peningkatan pengolahan produksi kelapa sawit yakni berupa pengembangan pabrik kelapa sawit di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga akhir 2016, terdapat 75 pabrik kelapa sawit dari perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur. Namun karena perkembangan yang cukup signifikan dari komoditas kelapa sawit, maka diperlukan penambahan pabrik kelapa sawit untuk memenuhi peningkatan pengolahan tandan buah segar dari kelapa sawit. Rencana perkembangan pabrik kelapa sawit dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7.
Rencana Perkembangan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2014-2018

Kabupaten	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Total	
	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)	Kapasitas terpakai (Ton TBS/Jam)	Jumlah (Unit)
Paser	30 45 60 90	5 5 3 1	30 45 60 90	5 5 3 1	30 45 60 90	5 6 4 1	30 45 60 90	5 6 4 1	30 45 60 90	6 6 4 1	30 45 60 90	6 6 4 1
Jumlah Paser		14		14		16		16		17		17
PPU	30 45 60 90	2	30 45 60 90	2	30 45 60 90	4	30 45 60 90	4	30 45 60 90	5 2	30 45 60 90	- 5 2
Jumlah PPU		2		2		6		6		7		7
Kutai Kartanegara	30 45 60 90	2 2 6 2	30 45 60 90	2 2 6 2	30 45 60 90	5 4 6 2	30 45 60 90	5 4 6 2	30 45 60 90	7 3 8 2	30 45 60 90	7 3 8 2
Jumlah Kukar		10		10		13		13		20		20
Kutai Barat	30 45 60 90	1	30 45 60 90	1	30 45 60 90	3	30 45 60 90	4	30 45 60 90	4	30 45 60 90	- 4 -
Jumlah Kubar		1		1		3		4		4		4
Kutai Timur	15 30 45 60 90	1 5 7 8 1	15 30 45 60 90	1 5 7 8 1	15 30 45 60 90	1 9 9 8 1	15 30 45 60 90	1 9 9 8 1	15 30 45 60 90	1 10 14 8 1	15 30 45 60 90	1 10 14 8 1
Jumlah Kutim		22		22		28		28		34		34
Berau	45 60 90 120	1 3 1	45 60 90 120	1 3 1	45 60 90 120	1 7 1	45 60 90 120	1 7 1	45 60 90 120	1 7 1	45 60 90 120	1 7 1
Jumlah Berau		5		5		9		9		9		9

3. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit

Komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Timur selain kelapa sawit adalah komoditas karet, kakao, kelapa dalam, dan lada. Meskipun produktivitas dan keuntungan finansial tidak sebesar kelapa sawit, namun komoditas unggulan non sawit tersebut memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan kelapa sawit seperti lebih ramah lingkungan karena tidak merusak keseimbangan unsur hara tanah. Oleh

sebab itu, dalam rangka meningkatkan peran subsektor perkebunan dalam pembangunan daerah, maka perlu adanya program prioritas pada pengembangan komoditas perkebunan unggulan non sawit.

Pada periode sebelumnya, secara umum produksi komoditas non sawit di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yakni dari hasil panen sebesar 89.883 ton pada tahun 2015 menjadi 81.484 ton pada tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 8.399 ton atau -9,34 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian Dinas Perkebunan dalam perencanaan strategis periode mendatang agar dapat mengantisipasi segala faktor yang menyebabkan penurunan produksi serta tidak tercapainya target pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peningkatan produktivitas subsektor perkebunan non sawit untuk memperbaiki capaian kinerja pada periode sebelumnya, maka pada revisi Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan melaksanakan kegiatan *Ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan*;

Sebagai komoditas perkebunan unggulan, komoditas karet, kakao, kelapa dalam dan lada akan dikembangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meskipun menjadi prioritas kedua setelah peningkatan produktivitas kelapa sawit. Sebagai *second line* pengembangan subsektor perkebunan, program pembangunan perkebunan non sawit menjadi program yang diunggulkan agar Provinsi Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman komoditi perkebunan. Dalam realisasi pelaksanaan program, fokus kegiatan pengembangan perkebunan non sawit adalah dengan cara mengembangkan jumlah produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada hasil panen perkebunan non sawit.

4. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perkebunan bertujuan untuk membekali setiap individu pertanian khususnya subsektor perkebunan dalam melakukan budidaya dan pengolahan komoditi perkebunan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai keberhasilan pekebun dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, maka dilaksanakan melalui program pemberdayaan tenaga pendamping perkebunan rakyat dengan kegiatan berupa "Pelatihan petgas lapang (fasda) dan teknis perkebunan".

5. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Data atau informasi terkait subsektor perkebunan merupakan sarana yang sangat potensial untuk merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi perkembangan setiap tahapan pelaksanaan program perkebunan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu penting adanya pengolahan data dan informasi melalui analisa dan kajian terhadap segala fenomena yang terjadi selama pelaksanaan program pembangunan. Pengolahan data dan informasi sendiri merupakan suatu sistem dari semua bentuk kegiatan dalam memperoleh dan mengolah data yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berinteraksi dari seluruh aktivitas kegiatan penyusunan program/kegiatan.

Ketersediaan data dan informasi merupakan syarat penting dalam proses perencanaan baik dalam hal penyusunan rencana kerja kegiatan, proses pelaksanaan, maupun pada saat pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan subsektor perkebunan. Oleh karena itu, dalam merealisasikan program pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan dibutuhkan kegiatan terstruktur berupa:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran; dan
- b. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

6. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan

Dalam pengelolaan lahan perkebunan harus dipastikan asal muasal lahan garapan sebagai media utama penanaman komoditas perkebunan. Status lahan merupakan syarat penting dalam penggarapan lahan karena status lahan yang “ambigu” akan berpotensi memberikan masalah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa lahan perkebunan yang akan digunakan bebas dari status sengketa baik dengan pihak pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Terdapat beberapa perhatian penting bagi para pekebun dalam mengelola tanah garapan perkebunan terkait perlakuan terhadap lahan garapannya seperti dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas perkebunan, maka bagi setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup (Undang-Undang No. 18 tahun 2004 Pasal 26).

Dengan demikian agar proses pembangunan subsektor perkebunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai, maka berdasarkan rencana

strategi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur akan merealisasikan kegiatan '*Penanganan konflik usaha perkebunan*';

7. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan

Pada periode berjalan saat ini, kegiatan pengembangan subsektor perkebunan hanya berupa aktivitas yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan di hulu (budidaya tanaman) seperti kegiatan penyiapan calon petani perkebunan, pembinaan kelompok tani, bimbingan budidaya dan cara panen yang benar. Sedangkan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pengolahan pasca panen tidak mendapatkan porsi pembinaan yang optimal sehingga berdampak pada mutu olahan produk-produk perkebunan yang kurang sesuai dengan standar pasar regional maupun internasional.

Realisasi program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar produk-produk olahan hasil perkebunan dimana pada rencana strategis Dinas Perkebunan periode ini akan mengaplikasikan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan pasca panen;
- b. Standarisasi mutu hasil perkebunan.

8. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan

Pengolahan dan pengembangan produk-produk hasil perkebunan merupakan salah satu cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani karena nilai jual hasil perkebunan akan naik dan secara otomatis pendapatan petani juga berbanding lurus. Untuk menyukseskan pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah perlu dilaksanakan suatu kegiatan yang mampu mendukung *upgrading* kualitas sumber daya manusia yang bergerak di subsektor perkebunan terutama pekebun.

Dalam upaya merealisasikan pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah, maka Dinas Perkebunan selaku domain dari setiap aktivitas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan pengolahan produk perkebunan;
- b. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan.

Selain kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perkebunan, terdapat pula beberapa kegiatan yang melibatkan SKPD lain dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Kegiatan lintas SKPD akan diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan mengacu pada program pemerintah pusat, provinsi,

maupun antar kabupaten/kota. Contoh kegiatan lintas SKPD tersebut seperti pembangunan dan operasionalisasi kawasan Industri Maloy yang berbasis komoditi perkebunan kelapa sawit.

9. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya inovasi berbagai teknologi terapan menyangkut peningkatan produk-produk perkebunan baik budidaya maupun teknologi pengolahan pasca panen. Penerapan teknologi pada budidaya merupakan perubahan *mindset* pekebun dari sistem tradisional menjadi perkebunan modern, sedangkan realisasi pelaksanaan teknologi terapan pada pengolahan pasca panen akan menghasilkan komoditi produk unggulan daerah yang berdaya saing baik pada tingkat regional maupun global.

Dalam rencana strategi Dinas Perkebunan periode 2013-2018, program peningkatan teknologi terapan perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan;
- b. Pengolahan hasil perkebunan.

10. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani

Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok tani dalam mengelola bantuan pemerintah baik sarana maupun prasarana pengolahan hasil perkebunan. Selama ini, untuk meningkatkan mutu hasil produk perkebunan telah dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan peralatan dan berbagai fasilitas lainnya. Meskipun begitu, masih ditemukan kendala yakni sulitnya mengorganisasi kelompok-kelompok tani agar pemanfaatan bantuan pengolahan tersebut dapat optimal.

Dengan adanya program ini diharapkan optimalisasi pemanfaatan sarana pengolahan dapat tercapai sehingga secara perlahan kelompok tani dapat mengelola sumber daya organisasi secara mandiri dan ekonomis. Realisasi program peningkatan kemandirian kelompok tani dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan kelompok tani perkebunan ;
- b. Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun.

11. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan

Pembangunan subsektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah daerah pada subsektor perkebunan agar konsistensi dan kontinuitasnya dapat terjaga. Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ekonomi perkebunan maka dilaksanakan kegiatan dengan pola kemitraan antara petani produsen dengan perusahaan swasta selaku mitra usaha. Dalam sistem kemitraan ini perlu ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan pembinaan serta bimbingan teknis kepada para petani produsen oleh Dinas Perkebunan maupun instansi terkait lainnya yang membidangi sistem kemitraan tersebut.

Dalam membangun sebuah sistem kemitraan usaha ditingkat lapangan, sangat diperlukan kejelasan hak dan kewajiban antara pekebun dengan perusahaan. Sebagai mitra usaha, perusahaan memerlukan proses-proses CP/CL sampai kepada penetapan petani yang diorganisasikan dalam suatu wadah berupa koperasi/kelompok tani. Kemudian, dengan adanya program revitalisasi perkebunan sebagai proses percepatan pembangunan perkebunan, maka akan mudah bagi perusahaan dengan mitra (koperasi) dalam membangun kebun dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah melalui pembiayaan dari pihak bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat

Perwujudan dari program tersebut akan meningkatkan kemandirian terhadap pemberdayaan kelembagaan petani khususnya dalam membangun perekonomian masyarakat. Dalam mencapai pemberdayaan kelembagaan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan "*Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan*";

12. Program Peningkatan Pemasaran dan Hasil Produksi Perkebunan

Persaingan global merupakan tantangan besar dalam pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Persaingan tersebut menuntut adanya kreativitas dalam mengolah hasil produk-produk perkebunan sehingga memiliki nilai tambah, nilai jual, dan berdaya saing lebih dibandingkan produk olahan lain. Meskipun begitu, salah satu poin penting dalam persaingan produk di pasar adalah bagaimana menyempurnakan sistem *marketing* dengan menggunakan promosi melalui *branding* pada pasar.

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan nilai produk hasil perkebunan di pasaran adalah dengan memfasilitasi terbentuknya unit pengolahan dan pemasaran

terpadu melalui sistem agroindustri modern. Diharapkan unit tersebut akan memperkecil kerugian di level pekebun karena mutu produk yang dihasilkan lebih beragam dan informasi harga di pasar menghindarkan pekebun dari permainan harga oleh tengkulak. Upaya ini akan memiliki analisis terhadap perkembangan situasi pasar komoditas perkebunan yang meliputi *supply-demand*, harga, situasi pasar lokal, nasional, bahkan global sehingga diperoleh strategi-strategi untuk mengantisipasi secara efektif segala situasi yang terjadi.

Realisasi dari program peningkatan pemasaran dan hasil produk perkebunan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Promosi produksi perkebunan;
- b. Pengelolaan informasi pasar.

13. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam beberapa periode terakhir ini, pembangunan di sektor pertanian sedang menjadi sorotan dunia internasional. Selain karena keterkaitannya dengan isu pangan dunia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi menyumbang peningkatan kualitas lingkungan hidup begitu juga sebaliknya dapat menjadi penyebab degradasi lingkungan. Pada kasus yang menjadi sorotan publik khususnya di subsektor perkebunan adalah komoditas kelapa sawit dimana komoditas tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas perkebunan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan karena menyebabkan berkurangnya penangkapan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan sehingga meracuni lingkungan di areal perkebunan.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan perkebunan sehingga arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat terealisasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pengembangan subsektor perkebunan. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasikan program pembinaan perkebunan berbasis pembangunan berkelanjutan maka dalam rencana strategi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan dilaksanakan kegiatan:

- a. Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan;
- b. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

14. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat

Salah satu penyebab menurunnya produktivitas usaha budidaya komoditas perkebunan adalah terjadinya serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman perkebunan. Sesuai UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan dengan Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Sistem PHT mendorong dikembangkannya cara-cara pengendalian OPT dengan spesifikasi lokasi sesuai kondisi yang ada serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem budidaya tanaman. Selain itu, sistem ini juga merupakan pengamanan hasil produk perkebunan dalam rangka pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkerakyatan. Oleh sebab itu, dalam rangka menyesuaikan perubahan paradigma konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan konsumen, maka dapat dilakukan beberapa kegiatan untuk menyukseskan program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat seperti "*Pelatihan Petani SL-PHT*";

15. Program Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)

Dalam budidaya tanaman perkebunan, perlindungan tanaman merupakan kegiatan yang penting, karena menjadi jaminan bagi terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebagaimana tercantum dalam UU No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Permasalahan di sektor Perkebunan sangatlah kompleks, salah satu diantaranya OPT karena dapat mengakibatkan produktivitas tanaman tidak optimal dan menimbulkan kerugian secara ekonomis. Akibat serangan OPT, diperkirakan dapat menyebabkan terjadi kehilangan hasil/produksi sekitar 30% - 40%.

Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu cara pengelolaan OPT yang memperhatikan faktor teknis, ekonomis, ekologis dan sosiologis. Pengelolaan OPT diarahkan pada cara yang ramah lingkungan dan aman terhadap manusia. Dalam implementasi PHT, pengamatan dan identifikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendasar dalam pengambilan keputusan pengendalian. Dengan pengamatan akan dapat diketahui sejak dini situasi OPT dan kondisi faktor pengendali perkembangannya, sehingga ledakan (eksplosip) OPT dapat dicegah. Pengamatan adalah salah satu tahapan dalam kegiatan perlindungan tanaman

perkebunan yang meliputi pengumpulan informasi tentang populasi dan atau tingkat serangan OPT serta keadaan pertanaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT tersebut. Oleh sebab itu, dalam mengimplementasikan program pengendalian OPT perkebunan berbasis pembangunan berkelanjutan maka dalam rencana strategi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 akan dilaksanakan kegiatan :

- a. Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan
- b. Operasional brigade proteksi perkebunan

16. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)

Perlindungan tanaman perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system budidaya tanaman, baik *on farm* maupun *off farm*. Peran perlindungan tanaman adalah menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas hasil atau produksi. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sejak awal dasawarsa 1980-an disebut berhasil menjadikan Indonesia berswasembada beras pada pertengahan dasawarsa tersebut. Keberhasilan PHT tersebut, yang berkembang dari PHT ambang ekonomi menjadi PHT sekolah lapang dan yang terakhir adalah PHT masyarakat. Jika penerapan PHT memang sedemikian berhasil Indonesia seharusnya berkontribusi besar terhadap penurunan kehilangan hasil.

Sebagian besar tanaman perkebunan merupakan tanaman keras yang memberikan lingkungan yang lebih stabil. Keadaan yang demikian cocok untuk menerapkan pengendalian secara hayati karena agens hayati mendapat kesempatan untuk dapat berkembang biak dengan baik. Diharapkan dapat mengatasi gejala populasi hama dan penyakit inangnya. Dari segi lain penerapan pengendalian hayati lebih menguntungkan, apabila agens hayati berhasil dikembangkan dengan baik akan berpengaruh lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan demikian kebijakan ini sesuai dengan prinsip pembangunan dengan berwawasan lingkungan.

Beberapa jenis tanaman perkebunan yang perlu mendapat perhatian karena terserang oleh organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti karet, kelapa sawit, kakao, lada dan kelapa. Komoditi tanaman tersebut sering mendapat serangan baik hama maupun penyakit dengan intensitas serangan sedang sampai berat. Dalam menerapkan pengendalian hayati, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan perbanyakkan agens pengendali hayati (APH)
- b. Uji terap aplikasi pengendali hayati, bio pestisida dan pestisida kimia

17. Program Konservasi Lahan dan Air

Tanah dan air dalam wilayah NKRI adalah karunia sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang (amanat UU no. 37 Tahun 2014). Dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan kekeringan, saat ini sudah dirasakan oleh petani pekebun. Kondisi saat ini bahaya banjir dan longsor semakin meningkat pada saat musim hujan, sementara pada musim kemarau kekeringan semakin parah karena tidak ada cadangan air yang cukup dalam tanah. Hal ini menyebabkan tingkat resiko kerugian pada budidaya perkebunan semakin meningkat.

Masyarakat terutama pelaku usaha perkebunan perlu dibekali dengan pengetahuan untuk melakukan konservasi tanah dan air sebagai upaya penerapan system usaha tani konservasi terpadu.

Di samping itu sesuai amanat Undang-undang NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kawasan-Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang ada dalam wilayah perkebunan baik yang dimiliki oleh perkebunan besar swasta maupun milik masyarakat harus dilindungi dan tidak boleh diganggu. Hal ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO dan RSPO. Untuk itu perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pemantauan dari Dinas Perkebunan terhadap keberadaan NKT.

Untuk itu upaya yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perlindungan lahan perkebunan
- b. Perlindungan sumber air diareal perkebunan

18. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan untuk pengembangan usaha perkebunan dengan skala yang luas, serta dukungan agroklimat yang sesuai untuk budidaya perkebunan. Ditinjau dari komoditasnya terdapat komoditas unggulan nasional seperti : Kelapa sawit, Karet, Kakao, Kelapa dan Lada.

Dalam rangka meningkatkan Potensi lahan di Provinsi Kalimantan Timur serta mendukung terhadap pengembangan usaha perkebunan, terutama terhadap komoditas unggulan seperti tanaman kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan lada. Pembangunan perkebunan meningkatkan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara dan penyediaan lapangan kerja.

Luas perkebunan di Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2016 (angka tetap) diantaranya adalah karet seluas 116.869 ha dengan produksi 62.106 ton, kopi seluas 3.049 ha dengan produksi 392 ton, kelapa sawit seluas 1.150.078 ha dengan produksi 11.418.110 ton, kakao seluas 7.931 ha dengan produksi 2.751 ton, lada seluas 9.382 ha dengan produksi 4.727 ton, kelapa dalam seluas 22.897 ha dengan produksi 11.078 ton.

Pembangunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sampai pada tahun 2016 dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota ada 358 Perusahaan Besar Swasta (PBS) dengan luas ijin lokasi 2.908.026 ha, PBS yang sudah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berjumlah 316 dengan luas IUP 2.398.463 ha. PBS yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ada 167 dengan luas 1.274.566 ha dan total luasan inti dan plasma serta rakyat yang sudah realisasi seluas 1.150.078 ha.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pembangunan perkebunan merupakan salah satu kontribusi yang baik dan positif dalam pengembangan di wilayah – wilayah di pedesaan khususnya terhadap masyarakat sekitar pengelolaan perkebunan.

Upaya dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut diatas, maka dilaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan database usaha perkebunan
- b. Pelayanan administrasi perijinan
- c. Pengawasan dan evaluasi usaha perkebunan

19. Program Pengendalian Kebakaran Kebun

Secara umum perubahan iklim di Indonesia menimbulkan dampak kearah yang merugikan bagi pelaku usaha perkebunan dalam hal pelestarian lingkungan, menurunnya produktifitas tanaman perkebunan dan kebakaran lahan dan kebun. Kebakaran lahan dan kebun menimbulkan berbagai dampak negative terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selain hilangnya asset dan kerusakan ekologi, dampak yang sangat menonjol dan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan system transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional maupun internasional. Kebakaran lahan dan kebun juga menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) terutama CO₂, N₂O dan CH₄ yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.

Meskipun berbagai aturan dan petunjuk teknis terkait dengan pengendalian kebakaran lahan kebun telah diterbitkan, namun dalam kenyataannya masih terjadi kebakaran lahan dan kebun. Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dalam penerapannya masih terkendala antara lain belum tersedianya teknologi tepat guna, murah dan ramah lingkungan serta belum dapat memanfaatkan limbah hasil bukaan lahan dan kebun. Pada sisi lain keinginan untuk membuka lahan dengan cara mudah, murah dan cepat, merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pembakaran lahan dan kebun, di awal tahun ini BMKG memprediksi cuaca di tahun 2017 akan normal.

Oleh karena itu, untuk menjawab semua permasalahan yang disebutkan diatas sebagai akibat dari kejadian kebakaran lahan kebun, harus dapat dipastikan bahwa kegiatan "*Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim*" berjalan sebagaimana mestinya.

20. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan

Dalam rangka pengawasan peredaran benih dan penanganan kasus peredaran benih tidak sesuai dengan label di Kalimantan Timur yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Olehnya itu dalam mengantisipasi peredaran benih palsu dimasyarakat yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka pemerintah provinsi khususnya Dinas Perkebunan melaksanakan program pengawasan peredaran benih perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi sumber benih
- b. Pengawasan peredaran benih

21. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih

Benih merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas kebun dan pendapatan masyarakat pekebun. Untuk mengusahakan pengadaan benih tersebut bagi produsen maupun pengedaran benih bina tanaman perkebunan harus memiliki izin atau tanda daftar yang diterbitkan oleh Gubernur. Ketentuan yang berkenaan dengan perbenihan tanaman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintahan 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

Untuk memperoleh benih unggul bermutu yang sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku harus dilakukan terlebih dahulu pengujian dan pemberian sertifikasi terhadap benih yang akan di edarkan kepada masyarakat, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengujian benih
- b. Sertifikasi benih

22. Program Penyediaan Bahan Tanaman

Seiring dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk mengembangkan tanaman perkebunan dan program pemerintah untuk peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan khususnya tanaman tahunan, kebutuhan akan benih unggul juga meningkat. Disisi lain terbatasnya ketersediaan benih unggul seringkali menimbulkan permasalahan seperti penggunaan benih yang tidak jelas asal usulnya.

Dalam rangka memenuhi ketersediaan benih unggul tanaman komoditi perkebunan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas, beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah diantaranya adalah pembangunan kebun induk sumber benih komoditi perkebunan perkebunan melalui program penyediaan bahan tanaman dengan kegiatan antara lain :

- a. Perbanyak bahan tanaman perkebunan
- b. Pengelolaan kebun induk/koleksi dan blok penghasil tinggi (BPT)

5.2. Indikator Kerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Rencana Strategi Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Program Prioritas, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Akhir Pencapaian

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
(1)	(2)	(3)
1 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)	
	a. Kelapa Sawit	19.00 Ton/Ha
	b. Karet	1.30 Ton/Ha
	c. Kelapa	0.68 Ton/Ha
	d. Kakao	0.77 Ton/Ha
	e. Lada	1.10 Ton/Ha
1.1 Intensifikasi komoditi	Luas kebun yang diintensifkan (Ha)	200 Ha
1.2 Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi (Ha)	200 Ha
1.3 Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Ha)	300 Ha
2 Program Perluasan Kebun Sawit	Luas kebun sawit (Juta Ha)	1.300 Juta Ha
2.1 Ekstensifikasi perkebunan sawit	Peningkatan Luas Kebun Sawit (Ha)	50 Ha
3 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (Ha)	150,617 Ha
	a. Karet	128,740 Ha
	b. Kakao	10,096 Ha
	c. Lada	11,781 Ha
3.1 Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi	Peningkatan luas Kebun Non Sawit	155 Ha
	a.Karet	70 Ha
	b.Lada	35 Ha
	c.Kakao	50 Ha
4 Program mitigasi emisi gas rumah kaca	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (Business As Usual)	25 %
4.1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang mengembangkan bio energi	6 PMS
4.2 Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah	32 PBS/ISPO dan Kelompok Tani
	a.PBS/ISPO	22 PBS/ISPO
	b.Petani	10 Kelompok Tani
5 Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV (High Conservation Value) yang terlindungi	50 %
5.1 Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (High Conservation)	50 PBS
5.2 Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi	300 Unit
	a. Embung	150 Unit
	b. Biopori	100 Unit
	c. Drainase	50 Unit
6 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80 %
6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10 Dokumen
6.2 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen
7 Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20 %
7.1 Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	20 %
8 Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat	30 %
8.1 Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang	2 Produk

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
(1)	(2)	(3)
8.2 Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina	60 Kelompok tani
	a.Karet	10 Kelompok tani
	b.Kelapa	10 Kelompok tani
	c.Kakao	15 Kelompok tani
	d.Lada	15 Kelompok tani
	e.Aren	10 Kelompok tani
9 Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	5 Komoditi
9.1 Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	7 Jenis
9.2 Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan	21 Produk
10 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	5 Komoditi
10.1 Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi	100 transaksi
10.2 Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar	2 Informasi
11 Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu	5 Kelompok Tani
11.1 Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	60 Orang
12 Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan	70 Orang
12.1 Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang	20 Orang
13 Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani	5 Gapoktan
13.1 Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani	10 Kelompok Tani
13.2 Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Jumlah Asosiasi	5 Asosiasi
14 Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	50 Perusahaan
14.1 Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial	2 Database
14.2 Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan)	50 Perusahaan
14.3 Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi	50 Perusahaan
15 Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	20 Kelompok
15.1 Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan	20 Kelompok
16 Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan	5 Produk

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR
(1)	(2)	(3)
16.1 Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina	50 Kelompok Tani
	a.Karet	15 Kelompok Tani
	b.Kelapa	5 Kelompok Tani
	c.Kakao	10 Kelompok Tani
	d.Lada	20 Kelompok Tani
16.2 Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi	15 %
17 Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	40 %
17.1 Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan	Luas kebakaran kebun	<100 Ha
18 Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	6 Kasus
18.1 Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal	15 Sumber benih
18.2 Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi	40,000,000 Benih
19 Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi	10,000,000 Benih
19.1 Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa)	3 Jenis
19.2 Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	300 Lembar
20 Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)	55 Kelompok
20.1 Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)	50 Kelompok tani
20.2 Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan	5 Regu
21 Program Pengembangan Bio Pesticida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pesticida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	5,000 kg
21.1 Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati	Jumlah APH yang diperbanyak: Trichoderma Metarhizium Beauveria, sp	5.000 Kg 5.000 0 0
21.2 Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pesticida dan Pesticida kimia	Jumlah uji APH, Bio pestisida dan pestisida kimia: APH Bio Pesticida Pesticida Kimia	3 Kali
22 Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah komoditas perkebunan	5 Komoditas
22.1 Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan	140,000 Benih
22.2 Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT (Blok Penghasil Tinggi) yang dipelihara	12.5 Ha

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Rencana Strategi Pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Petani Pekebun,
2. Petugas Perkebunan, dan
3. Perusahaan Swasta Perkebunan.

5.4 Pendanaan Indikatif

Segala macam pembiayaan program kegiatan pencapaian pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013-2018 mempergunakan sumber-sumber pendanaan yang telah ditelaah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi pembiayaan dalam realisasi perencanaan strategis pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Perkebunan. Dalam pelaksanaan perencanaan, Dinas Perkebunan harus mengoptimalkan sumber pembiayaan yang diperoleh melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Dekonsentrasi dari pemerintah pusat.

Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan Revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 dengan memperhitungkan berbagai komponen pergerakan finansial seperti pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Berikut pendanaan indikatif untuk setiap program strategis yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan pada periode 2014-2018:

Tabel 5.9.
Pendanaan Indikatif Untuk Setiap Program Strategis yang Dilaksanakan
Pada Periode Tahun 2014-2018

NO	PROGRAM	TAHUN PENDANAAN INDIKATIF				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	12,217,500,000	-	-	-	-
2	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	10,469,500,000	-	-	-	-
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	27,286,070,000	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	-	-	-	-
5	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	1,881,000,000	-	-	-	-
6	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	7,211,380,000	-	-	-	-
7	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	7,538,880,000	2,040,350,000	5,407,230,000	-	-
8	Perluasan Kebun Sawit	7,403,190,000	8,744,000,000	8,744,000,000	-	-
9	Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	24,142,660,000	13,437,200,000	14,358,350,000	-	-
10	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	199,950,000	185,450,000	-	-
11	Pengembangan Data/Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	4,798,200,000	3,254,900,000	3,500,000,000	-	-
12	Penanganan Konflik dan gangguan usaha perkebunan	2,300,000,000	2,706,400,000	2,350,000,000	-	-
13	Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	550,000,000	-	500,000,000	-	-
14	Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	-	173,300,000	348,300,000	-	-
15	Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	961,000,000	1,073,340,000	1,413,840,000	-	-
16	Pengembangan Produk Olahan Perkebunan	608,000,000	166,100,000	166,100,000	-	-
17	Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	90,110,000	426,750,000	426,750,000	-	-
18	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	1,807,500,000	1,194,050,000	1,470,520,000	-	-
19	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	2,984,500,000	1,744,000,000	2,000,000,000	-	-
20	Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	60,000,000	-	60,000,000	-	-

NO	PROGRAM	TAHUN PENDANAAN INDIKATIF				
		2014	2015	2016	2017	2018
21	Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	1,023,760,000	1,940,540,000	2,807,250,000	-	-
22	Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	5,179,120,000	2,433,210,000	2,366,900,000	-	-
23	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,469,300,000	4,319,820,000	4,350,020,000	-	-
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,916,000,000	10,832,310,000	6,146,020,000	-	-
25	Peningkatan Disiplin Aparatur	310,780,000	285,560,000	285,560,000	-	-
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	956,810,000	1,007,960,000	1,007,960,000	-	-
27	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,609,900,000	1,570,900,000	1,570,900,000	-	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	3,068,692,000	3,583,686,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	1,383,700,000	3,173,381,800
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	-	-	-	1,110,593,000	1,805,876,400
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	258,850,000	1,009,600,000
5	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	-	-	-	-	7,446,950,000
6	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	-	-	-	55,500,000	244,000,000
7	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	-	-	-	82,900,000	1,909,500,000
8	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	-	-	-	78,430,000	243,100,000
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	-	-	-	103,700,000	974,900,000
10	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	331,050,000
11	Program Perluasan Kebun Sawit	-	-	-	-	1,217,950,000
12	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	-	-	-	458,400,000	7,759,450,000
13	Program mitigasi emisi gas rumah kaca	-	-	-	49,000,000	825,050,000
14	Program konservasi lahan dan air	-	-	-	73,000,000	507,000,000
15	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	-	-	-	-	343,125,000
16	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	-	-	-	-	687,750,000
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	-	-	-	155,000,000	954,700,000
18	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	-	-	-	55,000,000	546,000,000
19	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	-	-	-	64,900,000	985,200,000
20	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	-	-	-	84,000,000	444,250,000
21	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	-	-	-	125,550,000	182,450,000
22	Program pengujian dan sertifikasi benih	-	-	-	134,000,000	218,900,000
23	Program Pengendalian OPT	-	-	-	88,800,000	250,000,000
24	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	-	-	-	66,025,000	307,000,000
25	Program penyediaan bahan tanaman	-	-	-	203,960,000	821,450,000
TOTAL		132,775,160,000	57,550,640,000	59,465,150,000	7,700,000,000	36,772,319,200

